

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.1.1 Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau disingkat UMKM merupakan bagian dari ekonomi rakyat yang mempunyai peran, potensi, dan kedudukan sehingga perlu diberdayakan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang berkembang, seimbang dan berkeadilan. Hal ini juga dikuatkan oleh TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Berdasarkan (Yazfinedi, 2018) UMKM memiliki beragam pengertian. Awalnya pengertian UMKM terbentuk melalui UU No.9 Tahun 1999 seiring berjalannya waktu karena perkembangan yang semakin dinamis terjadilah perubahan menjadi UU No.20 Tahun 2008. Menurut UU No.20 Tahun 2008 Pasal 1 pengertian dari UMKM sendiri itu dibagi menjadi jenis usahanya apakah itu mikro, kecil, atau menengah.

Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau satu kesatuan usaha yang memenuhi standar usaha mikro yang diatur dalam Undang-undang ini. Selanjutnya Usaha Kecil adalah usaha ekonomi

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Tidak seperti UU No.20 Tahun 2008 yang memberikan definisi UMKM berdasarkan penjualan tahunan dan kekayaan bersih, BPS memberikan definisi UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Namun, BPS tidak memberikan definisi terhadap usaha mikro melainkan hanya memberikan definisi terhadap usaha kecil dan menengah.

Menurut BPS Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja lima orang sampai dengan 19 orang. Sedangkan, usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

2.1.2 Kriteria UMKM

Berdasarkan UU No.20 Tahun 2008 pada Pasal 6 tentang Kriteria UMKM, Maka UMKM dapat dibagi berdasarkan kriteria berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

Harta bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha paling banyak Rp50.000.000,00 (50 juta rupiah) atau memiliki hasil penjualan tahunan tidak melebihi Rp300.000.000,00 (300 juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

Memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha lebih dari Rp50.000.000,00 (50 juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (500 juta rupiah) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (300 juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp2.500.000.000,00 (2 milyar 500 juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

Memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha lebih dari Rp500.000.000,00 (500 juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp10.000.000.000,00 (10milyar rupiah) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.2 Akuntansi

2.2.1 Pengertian Akuntansi

Statement no.4 Accounting Principle Board (APB) menjelaskan bahwa akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang

dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih berbagai alternatif.

Menurut *American Institute of Certified Public Accounting* (AICPA) akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan menafsirkan hasil-hasilnya.

Belkoui (2011:50) berpendapat bahwa definisi dari akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya memiliki sifat keuangan dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya.

Apabila disimpulkan dapat didefinisikan bahwa akuntansi adalah sebuah *information system* yang mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan keuangan perusahaan atau yang disebut dengan transaksi dan menghasilkan sebuah *output* berupa laporan keuangan yang nantinya dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang melaksanakan akuntansi.

2.3 Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah sebuah catatan yang berisi informasi kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut agar para pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan ekonomi perusahaan secara tepat.

2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Berdasarkan (Ningtyas, Penyusunan Laporan Keuangan UMKM, 2017) bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomik perusahaan oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut agar tersedianya informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas.

Selain itu laporan keuangan secara umum bertujuan untuk:

1. Memberikan tentang kondisi suatu perusahaan dalam bentuk angka-angka dalam satuan moneter.
2. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembuat keputusan bisnis dan ekonomis oleh investor yang ada dan yang profesional, kreditur, manajemen, pemerintah, dan pengguna lainnya.
3. Memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
4. Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya.

2.3.3 Komponen Laporan Keuangan

Agar posisi keuangan serta kinerja keuangan dapat dipertanggung jawabkan oleh manajemen perusahaan maka laporan keuangan harus disusun dengan penyajian yang telah terstruktur dan lengkap. Laporan keuangan yang lengkap itu terdiri dari Laporan Laba Rugi, Laporan Posisi Keuangan atau Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1. Laporan Laba Rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan dan mendeskripsikan pendapatan serta beban administrasi & operasi yang terjadi pada perusahaan yang nantinya menghasilkan laba bersih dalam suatu periode.
2. Laporan Posisi Keuangan atau Neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang memuat 3 klasifikasi besar yaitu: aset yang terdiri dari aset tetap, aset lancar, dan aset tidak berwujud. Lalu, ada liabilitas yang terdiri dari liabilitas jangka panjang dan liabilitas lancar atau liabilitas jangka pendek. Terakhir, ekuitas yang merupakan hak kepemilikan perusahaan terhadap aset yang sudah dikurangi dengan liabilitas.
3. Laporan Perubahan Ekuitas adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan penambahan atau pengurangan ekuitas selama periode tertentu.

2.4 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

2.4.1 Pengenalan SAK EMKM

EMKM atau Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Namun, ada kendala dibalik ini yaitu ada banyak Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah yang belum cukup mampu untuk melaksanakan pencatatan dan pembukuan hingga menyusun sebuah laporan keuangan. Padahal pencatatan, pembukuan, dan penyusunan sebuah laporan keuangan adalah hal yang sangat penting agar sebuah entitas mampu mengevaluasi kinerjanya dan posisi keuangannya setiap tahun. Bahkan entitas

bisa mendapatkan tambahan modal serta pinjaman dari bank dengan memiliki sebuah laporan keuangan (Nuvisari *et al.*, 2019).

Penelitian yang dilaksanakan oleh Salmiah *et.al* (2015) menemukan bahwa isi dari SAK ETAP itu tidak dipahami oleh 83% dari UMKM. Bahkan 70% dari responden tidak menggunakan *software* akuntansi agar terciptanya informasi akuntansi relevan serta tepat waktu. Lalu, 70% responden juga menghasilkan laporan keuangan yang tidak lengkap pasalnya UMKM tidak menyajikan informasi tambahan didalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya/minimnya pemahaman dan pengetahuan serta kurangnya kesadaran pentingnya penerapan akuntansi secara tepat dan lengkap sebagaimana yang diatur oleh SAK ETAP oleh pelaku UMKM terutama pada penyajian laporan keuangan agar dapat diperolehnya informasi keuangan entitas dalam satu periode akuntansi (Nuvisari *et al.*, 2019).

Minimnya pemahaman akuntansi secara tepat oleh pelaku UMKM, maka Dewan Standar Akuntansi Indonesia Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) telah melakukan pengembangan standar akuntansi agar lebih sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan pelaku UMKM dengan menghadirkan SAK yang dapat memajukan UMKM di Indonesia. Disebabkan oleh upaya DSAK IAI pada tahun 2016 akhirnya SAK EMKM disahkan dan efektif per 1 Januari 2018.

Dengan adanya SAK EMKM, maka UMKM tidak harus menyajikan laporan keuangan menggunakan SAK umum berbasis IFRS dan SAK ETAP. Dalam beberapa hal SAK EMKM menawarkan banyak kemudahan bagi UMKM karena SAK EMKM memuat pengaturan akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan

dengan SAK ETAP. Meskipun SAK EMKM dinyatakan lebih sederhana dan lebih mudah penerapannya dibandingkan dengan SAK umum berbasis IFRS dan SAK ETAP, tidaklah semudah yang dikatakan karena untuk menerapkan SAK EMKM dalam proses pelaporan keuangan tentunya memerlukan pemahaman yang cukup bagi pelaku UMKM namun di sisi lain Suhairi (2004) menyatakan bahwa kesadaran UMKM dalam menerapkan praktik keuangan masih rendah dan memiliki banyak kendala dan kelemahan yang terkait dengan tingkat pendidikan yang buruk dan kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai. Disamping itu, SAK EMKM yang dianggap lebih mudah tapi relatif baru bagi entitas bisnis maupun pemerintah dan pihak lainnya. Suksesnya implementasi SAK EMKM secara keseluruhan adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan kesiapan dari pelaku UMKM.

2.4.2 Laporan Keuangan Menurut SAK EMKM

Berdasarkan SAK EMKM yang dijelaskan pada paragraf 3.9 minimum laporan keuangan itu terdiri dari:

1. Laporan laba rugi selama periode.
2. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
3. Catatan atas laporan keuangan dimana berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan.

2.4.3 Laporan Laba Rugi Menurut SAK EMKM

SAK EMKM menjelaskan pada paragraf 5.1 bahwa laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan kinerja keuangan entitas pada suatu periode.

Pada paragraf 5.2 dijelaskan kembali laporan laba rugi itu terdiri dari dari pos-pos yaitu pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak. Pos-pos ini baru akan disajikan apabila pos tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas hal ini disebutkan pada paragraf 5.3 SAK EMKM.

Semua penghasilan dan beban yang itu akan diakui dalam laporan laba rugi kecuali SAK EMKM mensyaratkan lain. Selain itu, SAK EMKM juga memberi aturan terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan. Hal ini terdapat pada paragraf 5.4 SAK EMKM

2.4.4 Laporan Posisi Keuangan Menurut SAK EMKM

Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan.

Berdasarkan paragraf 4.2 laporan posisi keuangan itu menyajikan pos-pos berikut kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, ekuitas. Pos dan bagian dari pos ini baru disajikan jika penyaji nya relevan untuk memahami laporan posisi keuangan entitas.

Format dalam penyajian laporan posisi keuangan ini tidak ditentukan oleh SAK EMKM namun begitu, entitas masih dapat menyajikan pos-pos aset berdasarkan urutan likuiditas asetnya dan pos-pos liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo liabilitas. Hal ini dijelaskan pada paragraf 4.4

2.4.5 Catatan Atas Laporan Keuangan Menurut SAK EMKM

Catatan atas laporan keuangan ini memuat beberapa hal:

1. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan SAK EMKM
2. Rangkuman kebijakan akuntansi
3. Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Jenis informasi tambahan maupun rincian yang disajikan pada catatan atas laporan keuangan itu disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Selanjutnya catatan atas laporan keuangan ini disajikan secara sistematis selama penyajian tersebut dirasa praktis. Hal ini dijelaskan pada bab 6 paragraf 6.1- 6.4 SAK EMKM.

2.4.6 Pengakuan Unsur-Unsur Laporan Keuangan Pada SAK EMKM

Berdasarkan SAK EMKM dalam Bab 2 paragraf 2.12 disebutkan bahwa dalam penyajian unsur laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan itu terdapat proses pembentukan dan memenuhi kriteria sesuai dengan paragraf 2.2 dan 2.8 berikut:

1. Manfaat ekonomi yang terkait dengan akun yang disajikan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas.
2. Biaya yang dimiliki akun dapat diukur dengan andal.

Selanjutnya dijelaskan pada Bab 2 paragraf 2.13 tentang kriteria Kriteria pengakuan ketika manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aliran barang masuk atau keluar dari suatu entitas adalah periode pelaporan di mana laporan tersebut disusun, dengan penilaian tingkat ketidakpastian yang melekat pada

aliran manfaat ekonomi masa depan. Serta penilaian itu dibuat untuk pos-pos yang signifikan secara individual dan kelompok dari suatu populasi besar untuk pos-pos yang tidak signifikan secara individual.

Pada paragraf 2.14 yang menjelaskan tentang keandalan pengukuran disebutkan bahwa dalam banyak kasus, biaya suatu pos dapat diukur dengan andal. Dalam kasus lain, biaya tersebut harus diukur dengan perkiraan. Jika pengukuran secara tepat tidak mungkin dilakukan, maka pos tersebut tidak dapat diakui dan disajikan dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi.

SAK EMKM paragraf 2.18 juga menjelaskan bahwa konsep dan prinsip umum dari kerangka konseptual pelaporan keuangan itu dijadikan dasar untuk persyaratan pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Entitas juga dapat mempertimbangkan konsep pengukuran, definisi dan kriteria untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban jika tidak ada pengaturan tertentu yang dicantumkan dalam SAK EMKM.

Pengakuan aset sesuai yang dijelaskan pada paragraf 2.22 bahwa aset baru dapat diakui ketika aset tersebut memiliki biaya dan manfaat ekonomi yang akan diterima entitas dimasa depan dan dapat dipastikan oleh entitas. Selain itu aset harus diukur dengan andal. Apabila manfaat ekonomi atas aset diperkirakan tidak mungkin mengalir ke dalam suatu entitas walaupun telah terdapat biaya atas aset tersebut, maka aset tidak dapat diakui pada laporan posisi keuangan.

Lalu pada paragraf 2.23 disebutkan apabila terjadi pengeluaran entitas yang terkait manfaat ekonomi dan dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan

kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal maka liabilitas tersebut dapat diakui dalam laporan posisi keuangan.

Pada laporan laba rugi sesuai yang diatur pada Bab 2 paragraf 2.24 SAK EMKM penghasilan/pendapatan baru dapat diakui saat terjadi Ada peningkatan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban, yang dapat ditentukan dengan pasti.

Beban sebagaimana diatur pada SAK EMKM Bab 2 paragraf 2.25 bahwa beban baru bisa diakui di dalam laporan laba rugi jika ada penurunan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban, yang dapat ditentukan dengan pasti.

SAK EMKM Bab 2 paragraf 2.15 menjelaskan bahwa pengukuran adalah proses penentuan jumlah yang digunakan untuk mengakui aset, kewajiban, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan.

Dijelaskan lebih lanjut pada paragraf 2.16 bahwa dasar pengukuran laporan keuangan adalah biaya historis dimana biaya historis suatu aset adalah sejumlah kas atau setara kas yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat akuisisi sedangkan biaya historis liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal atau dijelaskan pada paragraf 8.9 bahwa nantinya pada akhir pelaporan aset serta liabilitas itu akan diukur pada harga transaksi yang nantinya akan dikurangkan dengan seluruh pembayaran atau penerimaan pokok dan bunga sampai dengan tanggal tersebut.

2.4.7 Penyajian Wajar pada SAK EMKM

SAK EMKM menjelaskan pada Bab 3 paragraf 3.2 bahwa penyajian wajar itu adalah disyaratkan sebagai sebuah penyajian yang jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasif.

Dilanjutkan oleh paragraf 3.3 bahwa penyajian laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan berikut:

1. Relevan artinya pengguna dapat menggunakan informasi untuk melakukan pengambilan keputusan.
2. Representasi tepat artinya informasi yang terdapat di laporan keuangan bebas dari kesalahan yang bersifat material maupun biasa serta dapat mempresentasikan apa yang akan direpresentasi secara tepat.
3. Keterbandingan artinya informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan antar entitas maupun antar periode agar dapat mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan entitas.
4. Keterpahaman artinya pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan tekun sehingga informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna.

2.5 Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ramadhani Harahap (2014) ditemukan bahwa kemampuan yang dimiliki pelaku UMKM dalam penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Artinya semakin

baik kemampuan UMKM dalam menyajikan sebuah laporan keuangan maka akan meningkatkan kinerja entitas sebesar 0,204 kali.

Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Pratiwiningsih (2017) bahwa kualitas penyajian laporan keuangan yang baik akan meminimalisir terjadinya resiko ketidaksempurnaan informasi atau bisa disebut informasi asimetris. Penelitian lain juga dilakukan oleh Fanani (2009) dimana disebutkan bahwa kualitas penyajian laporan keuangan yang disajikan memiliki hubungan yang negatif terhadap informasi asimetris yang dapat terjadi.

Kualitas penyajian laporan keuangan ini dapat dibedakan menjadi 3 faktor yaitu ketepatan waktu, relevansi, dan konservatisme. Faktor ini dapat digunakan sebagai penjelas atas penyebab terjadinya sebuah informasi asimetris. Informasi asimetris ini sangat rawan terjadi karena internal perusahaan tidak bersedia memberikan informasi yang buruk terkait entitasnya dan lebih memilih untuk memberikan informasi yang baik (Cheng *et al.*, 2010).

Berdasarkan Rini Indriani dan Wahiddatul Khoiriyah (2010) 3 faktor yang terdiri dari ketepatan waktu, relevansi, dan konservatisme dapat menggambarkan kualitas penyajian laporan keuangan yang akan berefek pada ekonomi atau keuangan entitas secara tidak signifikan dan memiliki pengaruh yang positif.

Informasi asimetris yang tersaji didalam laporan keuangan akan mengurangi kualitas laporan keuangan itu sendiri. Sehingga dengan adanya informasi asimetris yang terjadi akan memicu konflik kepentingan untuk melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh entitas (Butar Butar, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh David Santiago dan Dwi Estiningrum (2021) telah menunjukkan bahwa pelaku UMKM sudah menunjukkan persepsi yang baik terkait mengetahui pentingnya laporan keuangan yang dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa rata-rata pelaku UMKM sudah mengetahui pentingnya laporan keuangan dalam sebuah usaha salah satunya adalah untuk mengetahui perkembangan usaha. Persepsi ini juga dipengaruhi oleh pengalaman dan lama usaha pelaku UMKM telah dijalankan serta latar belakang Pendidikan pelaku UMKM.

Namun, meskipun UMKM mengetahui pentingnya laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian oleh Setyawati Yuli dan Hermawan Sigit (2018) menunjukkan hasil bahwa UMKM memiliki kendala dalam melakukan penyajian laporan keuangan. Kendala yang dihadapi oleh UMKM tersebut disebabkan oleh minimnya pemahaman pelaku UMKM terkait standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku dan sulitnya pelaku UMKM dalam membagi waktu dan biaya yang bisa dialokasikan untuk mempelajari penyajian laporan keuangan.

Imbas dari penyajian laporan keuangan yang tidak berkualitas akan menyebabkan UMKM sulit mendapatkan akses kepada perbankan khususnya di Indonesia. Perbankan akan beralasan bahwa entitas UMKM tidak memiliki laporan keuangan yang dapat diterima sebagai dasar untuk bisa memberikan pinjaman dana. Selain itu, dengan penyajian laporan yang kurang berkualitas akan mengakibatkan entitas mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan terkait usaha yang dijalankan, entitas tidak dapat mengetahui kondisi terkini dari usaha yang dijalankan, dan tanpa penyajian laporan keuangan yang berkualitas entitas

tidak dapat mengetahui informasi keuangan yang terdapat pada entitas (Ati *et al.*, 2020).

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penyajian laporan keuangan yang berkualitas akan membantu entitas mengetahui kondisi terkini perusahaan, membantu entitas dalam mengambil keputusan terkait operasional perusahaan, dan membantu entitas dalam mengetahui informasi keuangan yang terdapat pada entitas. Selain itu juga dapat diketahui bahwa informasi asimetris yang terdapat pada laporan keuangan akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang disajikan. Artinya semakin banyak informasi asimetris yang terdapat di laporan keuangan maka akan semakin rendah kualitas laporan keuangan yang disajikan. Hal ini juga akan menyulitkan entitas dalam mengakses perbankan untuk melakukan pinjaman dana.